



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA TARAKAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO HARYANTO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **100366**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.103.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/204 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 735 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 318.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
11. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	152.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	82.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.508.188.496
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.845.688.496
III. HUTANG	Rp.	662.825.594
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.182.862.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.